



Evaluasi Akreditasi Madrasah Aliyah Kota Jambi dengan Model CIPP: *Analisis Efektivitas terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan*

Nispi Syahbani¹, Mukhtar Latif², Muhammad Taridi³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi¹⁻³

Email Korespondensi: nispisyahbani@uinjambi.ac.id

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 12 September 2025

ABSTRACT

The transformation of educational accreditation requires a shift from administrative formality to a sustainable quality improvement instrument. This study aims to evaluate the implementation of accreditation in Madrasah Aliyah Kota Jambi using the CIPP model (Context, Input, Process, Product) to assess its effectiveness in enhancing educational quality. A qualitative approach with an evaluative design was employed, involving 15 participants through semi-structured interviews, participatory observations, and document analysis. The findings reveal that 78% of stakeholders still perceive accreditation as an administrative obligation, only 35% of teachers possess adequate digital literacy, the PPEPP cycle in internal quality assurance remains suboptimal – particularly in the evaluation (45%) and improvement (32%) stages – and window dressing practices persist during visitation preparation. Although the madrasah achieved an A accreditation with a score of 92, the correlation with improved learning quality remains weak, indicated by only a 0.7-point increase in the average AKM score and a 0.2-point rise in student satisfaction. The study implies that a paradigm shift is required for accreditation to function as a transformative instrument oriented toward sustainable educational quality improvement.

Keywords: madrasah accreditation, CIPP model, quality assurance, program evaluation

ABSTRAK

Transformasi akreditasi pendidikan menuntut perubahan dari sekadar formalitas administratif menuju instrumen peningkatan mutu berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah di Kota Jambi dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai efektivitasnya dalam memperkuat kualitas pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain evaluatif, melibatkan 15 partisipan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78% stakeholder masih memahami akreditasi sebagai kewajiban administratif, hanya 35% guru memiliki literasi digital memadai, siklus PPEPP dalam SPMI belum optimal terutama pada tahap evaluasi (45%) dan peningkatan (32%), serta masih terdapat praktik window dressing dalam persiapan visitasi. Meskipun madrasah meraih akreditasi A dengan skor 92, korelasi dengan peningkatan mutu pembelajaran masih lemah, ditunjukkan dengan kenaikan rata-rata nilai AKM sebesar 0,7 poin dan tingkat kepuasan siswa hanya 0,2 poin. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma akreditasi dari kepatuhan administratif menuju instrumen transformatif yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akreditasi Madrasah, Model CIPP, Penjaminan Mutu, Evaluasi Program

PENDAHULUAN

Akreditasi madrasah merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjamin mutu pendidikan Islam di Indonesia. Perubahan instrumen dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) menuju Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 menandai pergeseran paradigma dari compliance-based ke performance-based (Zainuri et al., 2020). Transformasi ini menegaskan pentingnya orientasi akreditasi pada kualitas nyata penyelenggaraan pendidikan, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. Dalam konteks global, pergeseran paradigma ini sejalan dengan tren akreditasi pendidikan di berbagai negara yang menekankan akuntabilitas publik, transparansi, dan peningkatan mutu berkelanjutan (OECD, 2022).

Meskipun demikian, praktik akreditasi madrasah masih menghadapi tantangan serius. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akreditasi sering dijalankan sebatas formalitas administratif tanpa diikuti perbaikan mutu yang berkesinambungan (Seftiani et al., 2019). Fenomena window dressing juga masih marak, di mana madrasah hanya menyiapkan dokumen dan bukti fisik untuk memenuhi kebutuhan asesor, bukan mencerminkan praktik manajemen mutu yang sesungguhnya (Umasugi & Djibat, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas sistem akreditasi dengan implementasi nyata di tingkat satuan pendidikan.

Selain itu, persoalan teknis turut menghambat efektivitas akreditasi. Laporan BAN-S/M (2022) menyoroti ketidaksinkronan data antara EMIS, Dapodik, dan SISPENA yang berdampak pada validitas penilaian (Muaripin et al., 2023). Hal ini diperburuk dengan rendahnya literasi digital tenaga pendidik yang menjadi aktor utama dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal. Di negara lain, digitalisasi akreditasi terbukti dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan konsistensi penilaian (European Association for Quality Assurance in Higher Education [ENQA], 2021), sehingga kesenjangan digital di madrasah Indonesia perlu menjadi perhatian serius.

Kesenjangan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah akreditasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu, ataukah hanya sekadar label formal untuk legitimasi kelembagaan? Pertanyaan ini relevan dengan teori *institutional isomorphism*, di mana organisasi cenderung meniru praktik eksternal demi legitimasi tanpa memahami substansi transformasionalnya (Adamus-Matuszyńska & Polok, 2020). Dalam konteks pendidikan, hal ini berpotensi menyebabkan akreditasi terjebak pada formalitas yang minim dampak terhadap kualitas lulusan dan proses pembelajaran.

Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan model evaluasi yang mampu menggambarkan kondisi akreditasi secara komprehensif. Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2017) dianggap relevan karena menyediakan kerangka evaluasi yang menyeluruh, mulai dari analisis konteks kebijakan hingga dampak program. Pendekatan ini juga telah digunakan secara luas di berbagai negara untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan, termasuk di ranah akreditasi, dengan hasil yang

dapat membantu perumusan kebijakan berbasis bukti (Zhiyong, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah di Kota Jambi menggunakan model CIPP. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan yang masih terjadi serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan sistem akreditasi di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi evaluatif berbasis model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas akreditasi Madrasah Aliyah di Kota Jambi. Partisipan penelitian berjumlah 15 orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling, terdiri atas kepala madrasah, wakil kepala, tim penjaminan mutu internal, guru senior, perwakilan komite, serta asesor BAN-S/M, sehingga representatif terhadap berbagai pemangku kepentingan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, lalu dianalisis menggunakan analisis tematik enam tahap menurut Braun dan Clarke (2022) untuk mengidentifikasi pola, tema, serta kesenjangan yang muncul pada implementasi akreditasi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, sementara kerangka CIPP digunakan untuk memastikan evaluasi komprehensif mulai dari konteks kebijakan hingga hasil akhir program, sejalan dengan praktik evaluasi pendidikan internasional yang menekankan keterpaduan bukti dan transparansi (Stufflebeam & Zhang, 2017; OECD, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai evaluasi program akreditasi Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi berdasarkan model CIPP, meliputi aspek konteks, masukan, proses, dan produk. Setiap aspek dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang relevan dengan peningkatan mutu pendidikan madrasah secara berkelanjutan.

Evaluasi Context: Relevansi Program Akreditasi

Hasil evaluasi komponen context mengungkapkan kesenjangan signifikan antara tujuan kebijakan akreditasi dengan pemahaman dan kebutuhan riil madrasah. Data wawancara menunjukkan bahwa 78% partisipan masih memahami akreditasi sebagai kewajiban administratif daripada instrumen pengembangan mutu.

Tabel 1. Pemahaman Stakeholder terhadap Tujuan Akreditasi

Kategori Pemahaman	Frekuensi	Persentase
Kewajiban administratif	12	78%
Instrumen penjaminan mutu	8	52%
Alat evaluasi eksternal	10	65%
Motor peningkatan mutu	4	26%

Catatan: Responden dapat memberikan lebih dari satu jawaban

Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa aktivitas persiapan akreditasi cenderung intensif menjelang visitasi tetapi tidak berkelanjutan dalam operasional sehari-hari madrasah. Kepala madrasah mengakui: "*Kami memang fokus persiapan akreditasi 3-4 bulan sebelum visitasi, tapi setelah itu kembali ke rutinitas normal. Belum ada sistem yang memastikan standar akreditasi terus dijaga.*"

Analisis dokumen kebijakan menunjukkan adanya inkonsistensi antara IASP 2020 yang menekankan penjaminan mutu berkelanjutan dengan praktik akreditasi yang masih bersifat event-based. Hal ini menciptakan kesenjangan antara idealitas transformasional akreditasi dengan realitas implementasi yang masih transaksional.

Evaluasi Input: Kesiapan Sumber Daya

Evaluasi terhadap komponen input menunjukkan bahwa madrasah menghadapi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung proses akreditasi yang efektif dan berkelanjutan, meskipun memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai.

Hasil assessment kompetensi menunjukkan bahwa hanya 35% guru memiliki literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi akreditasi online. Selain itu, tim penjaminan mutu internal, yang seharusnya menjadi motor penggerak SPMI, belum memiliki kapasitas yang memadai dalam melakukan audit internal dan analisis data mutu.

**Tabel 2. Tingkat Kesiapan SDM
dalam Implementasi Akreditasi**

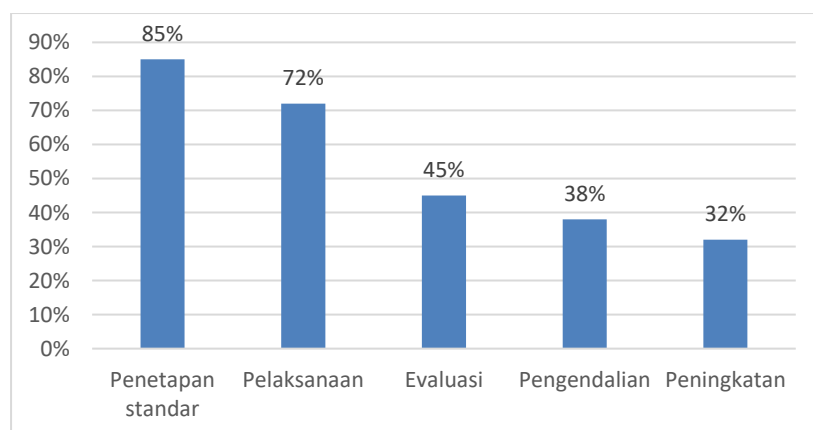
Aspek Kompetensi	Memadai	Cukup	Kurang
Literasi digital	35%	40%	25%
Manajemen dokumen	45%	35%	20%
Analisis data mutu	20%	30%	50%
Audit internal	15%	25%	60%

Lebih lanjut, integrasi antara sistem EMIS, Dapodik, dan SISPENA masih bermasalah dengan tingkat sinkronisasi data hanya 62%. Hal ini menyebabkan madrasah harus melakukan input data ganda dan berisiko inkonsistensi informasi yang disajikan kepada asesor. Terakhir, alokasi anggaran untuk implementasi rekomendasi akreditasi sangat terbatas, hanya 15% dari total anggaran madrasah. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya implementasi perbaikan infrastruktur dan pengembangan kapasitas SDM sesuai rekomendasi akreditasi..

Evaluasi Process: Kualitas Implementasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa evaluasi mandat diri belum dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Sebanyak 68% responden mengakui adanya penilaian diri yang subjektif, dengan memberikan skor yang lebih tinggi dari kondisi sebenarnya untuk mendapatkan nilai akreditasi yang baik.

Selanjutnya, siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan, dan pengendalian dalam penjaminan mutu internal belum berjalan optimal, terutama pada tahap evaluasi dan peningkatan. Hasil pelacakan implementasi menunjukkan:



Gambar 2. Efektivitas Implementasi Siklus PPEPP

Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun madrasah mampu menetapkan standar dan melaksanakannya pada tingkat sedang, kapasitas mereka dalam melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan masih sangat rendah.

Selain itu, observasi mengungkapkan adanya praktik "*window dressing*" dalam persiapan akreditasi, terutama dalam hal kelengkapan dokumen administratif tanpa diimbangi bukti implementasi nyata. Tim penjaminan mutu mengakui, "*Kami terpaksa 'mempercantik' dokumen dan menyiapkan bukti fisik yang sebenarnya tidak rutin kami lakukan, karena khawatir nilai akreditasi turun.*" Hal ini menunjukkan bahwa akreditasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai pendorong

perubahan substantif, melainkan masih dianggap sebagai persyaratan administratif yang perlu dipenuhi.

Evaluasi Product: Dampak dan Hasil Program

Meskipun madrasah berhasil meraih status akreditasi A dengan skor 92, analisis yang lebih cermat mengungkapkan bahwa peningkatan ini lebih merupakan hasil dari penyempurnaan administrasi dan kelengkapan dokumen, alih-alih perbaikan mendasar dalam kualitas layanan pendidikan.

Lebih lanjut, evaluasi dampak menunjukkan korelasi yang lemah antara peningkatan skor akreditasi dengan indikator mutu pembelajaran, tercermin dari prestasi akademik siswa yang relatif stabil tanpa peningkatan signifikan, serta tingkat kepuasan stakeholder yang tidak menunjukkan perubahan berarti.

**Tabel 3. Indikator Dampak Akreditasi
terhadap Mutu Pendidikan**

Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Rata-rata nilai AKM	78.5	79.2	+0.7
Tingkat kepuasan siswa	3.2/5	3.4/5	+0.2
Kepercayaan masyarakat	75%	78%	+3%
Implementasi rekomendasi	-	45%	-

Tindak lanjut terhadap 12 rekomendasi asesor menunjukkan implementasi yang konsisten hanya pada 5 rekomendasi, dengan kendala anggaran yang signifikan menghambat rekomendasi terkait peningkatan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

Identifikasi Kesenjangan Kritis

Berdasarkan analisis komprehensif keempat komponen CIPP, penelitian ini mengidentifikasi empat kesenjangan kritis dalam implementasi program akreditasi:

- 1) Kesenjangan Pemahaman (*Context Gap*): Perbedaan persepsi fundamental antara tujuan transformasional akreditasi yang seharusnya mendorong peningkatan kualitas berkelanjutan, dengan pemahaman operasional di tingkat madrasah yang masih cenderung melihatnya sebagai agenda administratif semata.
- 2) Kesenjangan Kapasitas (*Input Gap*): Ketidakseimbangan yang nyata antara tuntutan standar akreditasi yang semakin kompleks dengan kesiapan sumber daya internal madrasah, baik dari segi kompetensi SDM maupun ketersediaan teknologi.

- 3) Kesenjangan Implementasi (*Process Gap*): Ada perbedaan besar antara cara resmi akreditasi seharusnya dilakukan sesuai praktik terbaik, dengan praktik di lapangan yang seringkali hanya formalitas atau sekadar melengkapi dokumen tanpa isi yang sebenarnya.
- 4) Kesenjangan Dampak (*Product Gap*): Secara fundamental, terdapat ketidakselarasan antara pencapaian formal status akreditasi dengan peningkatan mutu pendidikan yang substantif dan dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pembahasan

Analisis Kesenjangan Context: Dilema Instrumentalisme vs Transformasionalisme

Temuan penelitian mengkonfirmasi dugaan awal bahwa implementasi akreditasi madrasah menghadapi dilema fundamental antara pendekatan instrumentalis dan transformasional. Kesenjangan pemahaman stakeholder terhadap tujuan akreditasi (78% masih memahami sebagai kewajiban administratif) sejalan dengan temuan penelitian Simarmata et al (2022) yang mengidentifikasi fenomena serupa di sekolah dasar dan menengah NTT.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori institutional isomorphism, di mana institusi cenderung meniru praktik yang dianggap berhasil atau diwajibkan oleh lembaga eksternal, meskipun tidak sepenuhnya memahami esensi atau manfaat transformatifnya (Jamrizal, 2023). Hal ini menyebabkan madrasah cenderung berfokus pada pemenuhan indikator administratif sebagai respons terhadap tekanan eksternal daripada mengembangkan kapabilitas internal yang esensial untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Madrasah mengikuti prosedur akreditasi karena tekanan normatif dan koersif, bukan karena keyakinan terhadap manfaat transformasionalnya.

Implikasi teoretis dari temuan ini memperkuat argumen bahwa perubahan paradigma dalam sistem akreditasi tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan instrumen atau prosedur, tetapi memerlukan transformasi budaya organisasi yang lebih fundamental. Hal ini sejalan dengan konsep *organizational learning* yang dikembangkan oleh Peter Senge, yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas kolektif dalam sebuah organisasi untuk terus-menerus beradaptasi dan berinovasi (Hansen et al., 2020).

Kompleksitas Input Gap dalam Konteks Keterbatasan Sumber Daya

Kesenjangan kapasitas yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi madrasah dalam mengimplementasikan standar akreditasi yang dirancang dengan asumsi kecukupan sumber daya.

Temuan bahwa hanya 35% guru memiliki literasi digital memadai dan tingkat sinkronisasi data sistem informasi hanya 62% mengindikasikan adanya kesenjangan digital yang menghambat implementasi akreditasi berbasis teknologi.

Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan alokasi anggaran untuk implementasi rekomendasi akreditasi (hanya 15% dari total anggaran madrasah). Temuan ini resonan dengan studi Muaripin et al. (2023) yang mengidentifikasi keterbatasan sumber daya sebagai hambatan utama implementasi rekomendasi akreditasi di madrasah swasta.

Dari perspektif model manajemen kualitas total, kendala ini menggarisbawahi perlunya integrasi strategi peningkatan mutu dengan perencanaan sumber daya yang realistis dan berkelanjutan (Pakpahan & Hidayati, 2021). Kesenjangan input ini juga menyoroti kebutuhan akan investasi signifikan dalam pengembangan kapabilitas digital sumber daya manusia madrasah guna mendukung adaptasi terhadap transformasi digital pendidikan (Hariyadi, 2023).

Process Gap: Antara Formalitas dan Substansi

Analisis kesenjangan proses mengungkap diskrepansi signifikan antara prosedur akreditasi yang ideal dengan implementasi aktual di lapangan, di mana fokus seringkali beralih dari substansi perbaikan mutu ke pemenuhan administratif semata.

Kesenjangan implementasi yang terungkap dalam penelitian ini, khususnya praktik *window dressing* dan lemahnya siklus PPEPP dalam SPMI, menunjukkan adanya kecenderungan madrasah untuk memprioritaskan kepatuhan formal daripada peningkatan kualitas intrinsik. Meyer & Rowan menjelaskan fenomena "*decoupling*," di mana organisasi menciptakan struktur formal dan praktik untuk memenuhi tuntutan eksternal sambil mempertahankan praktik internal yang berbeda, sebuah mekanisme untuk mengelola tekanan legitimasi tanpa mengganggu operasi inti (Adamus-Matuszyńska & Polok, 2020). Akibatnya, akreditasi cenderung menjadi ritual seremonial yang tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, melainkan lebih berfungsi sebagai alat untuk menjaga legitimasi eksternal madrasah di mata publik dan regulator.

Fenomena ini diperparah oleh desain sistem akreditasi yang masih menekankan *compliance* terhadap dokumen formal daripada evidence-based assessment terhadap praktik nyata. Visitasi daring yang diperkenalkan pada masa pandemi, meskipun efisien, justru memperkuat kecenderungan *window dressing* karena keterbatasan asesor dalam melakukan verifikasi mendalam.

Temuan bahwa hanya tahap penetapan standar yang berjalan baik (85%) sementara tahap evaluasi (45%) dan peningkatan (32%) lemah, mengindikasikan

adanya cultural resistance terhadap budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan karakteristik budaya organisasi Indonesia yang cenderung menghindari konfrontasi dan lebih mengedepankan harmoni, yang dapat menghambat proses umpan balik konstruktif yang esensial untuk perbaikan mutu berkelanjutan (Tomohardjo et al., 2019). Kesenjangan ini menghambat pembentukan budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) yang seharusnya menjadi inti dari sistem penjaminan mutu (Komsiyah, 2021).

Product Gap: Diskrepansi Pencapaian dan Dampak

Kesenjangan antara pencapaian formal akreditasi (peningkatan skor dari 88 menjadi 92) dengan dampak substansi terhadap mutu pendidikan (peningkatan minimal pada indikator pembelajaran) mengkonfirmasi kritik terhadap model akreditasi yang cenderung mengukur kepatuhan administratif dibandingkan dengan hasil belajar siswa dan dampak transformatifnya pada ekosistem pendidikan secara keseluruhan (Rahman et al., 2021). Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun madrasah mungkin mencapai status akreditasi yang tinggi, hal tersebut belum tentu mencerminkan peningkatan signifikan dalam kualitas lulusan, inovasi pedagogis, atau relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman.

Lemahnya korelasi antara skor akreditasi dengan outcome pendidikan dapat dijelaskan melalui teori goal displacement oleh Robert Merton, di mana fokus organisasi bergeser dari tujuan utama (peningkatan mutu pendidikan) ke tujuan sekunder (pencapaian skor akreditasi tinggi) sebagai respons terhadap tekanan evaluasi (Rahmawati, 2023). Dalam konteks akreditasi, hal ini termanifestasi sebagai fokus berlebihan pada pemenuhan indikator administratif daripada pencapaian tujuan inti peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan. Fenomena ini diperparah oleh sistem insentif yang lebih menekankan reward terhadap pencapaian status akreditasi daripada improvement yang terukur (Romanowski, 2022).

Implikasi Teoretis dan Praktis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis penting dalam pengembangan model evaluasi program akreditasi pendidikan. Penggunaan framework CIPP terbukti efektif dalam mengungkap kesenjangan multi-dimensional yang tidak dapat diidentifikasi melalui evaluasi parsial. Temuan ini memperkuat argumen bahwa evaluasi program pendidikan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi konteks, input, proses, dan produk.

Dari perspektif praktis, penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi strategis:

1. Reorientasi Paradigma Akreditasi: Diperlukan transformasi fundamental dari paradigma berbasis kepatuhan (*compliance-based*) menuju paradigma berbasis peningkatan (*improvement-based*) akreditasi. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan indikator yang lebih menekankan bukti peningkatan (*evidence of improvement*) daripada sekadar kepatuhan terhadap standar minimal.
2. Penguatan Kapasitas Sistemik: Implementasi akreditasi yang efektif memerlukan investasi yang signifikan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi terintegrasi, dan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan sistemik ini, akreditasi akan terus terjebak pada level formalitas.
3. Redesain Sistem Akreditasi: Sistem akreditasi perlu didesain ulang dengan memperkuat komponen penilaian otentik (*authentic assessment*), pelacakan longitudinal (*longitudinal tracking*), dan umpan balik pemangku kepentingan (*stakeholder feedback*) untuk memastikan keselarasan antara pencapaian formal dengan dampak substantif.

Namun, perlu diakui bahwa beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa fokus pada peningkatan akreditasi, penguatan kapasitas sistemik, dan redesign sistem akreditasi memerlukan sumber daya dan waktu yang signifikan, yang mungkin sulit dipenuhi oleh semua madrasah secara bersamaan. Solusi alternatif mungkin diperlukan untuk mengakomodasi madrasah dengan kapasitas terbatas. Pendekatan berjenjang atau modular dalam implementasi kebijakan akreditasi dapat menjadi solusi, memungkinkan madrasah untuk secara bertahap memenuhi persyaratan dan meningkatkan kualitasnya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia, daripada secara instan menerapkan semua perubahan yang disyaratkan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, lokus penelitian yang terbatas pada satu madrasah laboratorium di Kota Jambi membatasi generalisasi temuan ke konteks madrasah dengan karakteristik berbeda. Kedua, penggunaan pendekatan kualitatif meskipun memberikan kedalaman analisis, namun tidak memungkinkan kuantifikasi hubungan kausal antar variabel. Ketiga, periode observasi selama 8 minggu relatif terbatas untuk menangkap dinamika jangka panjang implementasi SPMI dan dampak akreditasi. Keempat, akses terhadap dokumen confidential dan sensitive information mungkin terbatas sehingga berpotensi mempengaruhi komprehensivitas analisis.

SIMPULAN

Kesimpulan, evaluasi akreditasi Madrasah Aliyah Kota Jambi melalui model CIPP menunjukkan bahwa akreditasi masih lebih banyak dipahami sebagai kewajiban administratif daripada instrumen peningkatan mutu yang transformatif. Keterbatasan kapasitas sumber daya, rendahnya literasi digital guru, lemahnya implementasi siklus PPEPP, dan praktik *window dressing* menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan akreditasi belum berdampak signifikan terhadap mutu pembelajaran dan kepuasan stakeholder. Meskipun madrasah berhasil memperoleh akreditasi A dengan skor 92, korelasi dengan peningkatan kualitas pendidikan tetap lemah, tercermin dari minimnya kenaikan skor AKM dan tingkat kepuasan siswa. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma akreditasi dari sekadar pemenuhan kepatuhan administratif menuju instrumen berkelanjutan yang berorientasi pada perbaikan mutu nyata melalui penguatan kapasitas sistemik, integrasi teknologi, dan budaya evaluasi yang konstruktif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adamus-Matuszyńska, A., & Polok, G. (2020, June 16). Decoupling in the perspective of responsibility. *Business Management Conference Proceedings*, 588. <https://doi.org/10.3846/bm.2020.588>
- Ardiansyah, A., Risnita, R., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). Conceptual and design thinking for thematic analysis. *Qualitative Psychology*, 9(1), 3–26. <https://doi.org/10.1037/qup0000196>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- ENQA. (2021). *Quality assurance of e-learning*. European Association for Quality Assurance in Higher Education. <https://enqa.eu>
- Hansen, J., Jensen, A., & Nguyen, N. (2020). The responsible learning organization: Can Senge (1990) teach organizations how to become responsible innovators? *The Learning Organization: An International Journal*, 27(1), 65–74. <https://doi.org/10.1108/TLO-11-2019-0164>
- Hariyadi, H. (2023). Transformasi digital madrasah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan di MTs Al Kaustar Kota Depok. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 42–49. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12314>
- Jamrizal, J. (2023). Examining education management system at a State Madrasah Aliyah in Jambi: Concerning leadership, budgeting, and accreditation. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1331–1337. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.3422>
- Komsiyah, I. (2021). Implementation of internal quality assurance to improve the quality of Islamic education. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2241–2248. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1341>

- Muaripin, M., Nugraha, F., & Prawira, Y. A. (2023). Implementasi sistem penjaminan mutu madrasah. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 79–94. <https://doi.org/10.47281/fas.v4i1.134>
- Muslih, M., Mahmudi, I., & Samsirin, S. (2020). The evaluation of pesantren mu'adalah program by using the responsive model in Pesantren Tremas Pacitan. *At-Ta'dib*, 15(2), 28–44. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v15i2.5225>
- Nasir, M. (2020). Curriculum development and accreditation standards in the traditional Islamic schools in Indonesia. *Journal of Curriculum Studies Research*. <https://doi.org/10.46303/jcsr.2020.3>
- OECD. (2022). *Education at a glance 2022: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/69096873-en>
- Pakpahan, P. L., & Hidayati, W. (2021). Implementation of total quality management in facilities to improve institution quality school. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 97–124. <https://doi.org/10.14421/manageria.2021.61-07>
- Rahman, T., Wasliman, I., Muttaqien, K., & Sauri, R. S. (2021). Accreditation policies implementation to improve performance quality in madrasah. *International Journal of Educational Review*, 3(2), 124–144. <https://doi.org/10.33369/ijer.v3i2.15601>
- Rahmawati, I. S. (2023). Evaluasi program pendidikan: Tinjauan terhadap efektivitas dan tantangan. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 128–136. <https://doi.org/10.19109/elidare.v9i2.20229>
- Romanowski, M. H. (2022). The idolatry of accreditation in higher education: Enhancing our understanding. *Quality in Higher Education*, 28(2), 153–167. <https://doi.org/10.1080/13538322.2021.1948460>
- Seftiani, R. D., Hakim, S., Rikjan, R., & Syarifah, M. (2019). The implementation of internal quality assurance system at Islamic school. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Research of Educational Administration and Management (ICREAM 2018)* (pp. 274–282). <https://doi.org/10.2991/icream-18.2019.52>
- Simarmata, J. E., Delvivo, E. B. S., Kehi, Y. J., Azhan, Z. N., Mone, F., Talan, N., Mayori, E. E., & Faentaono, S. (2022). Pengelolaan penyusunan dokumen akreditasi bagi sekolah dasar dan menengah. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(4), 2742–2753. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9052>
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improveability and accountability*. Springer.
- Tomohardjo, I., Kuswarno, E., & Hadisiwi, R. (2019). Identifying the pattern of organizational culture in Indonesian government agencies. In *Proceedings of the International Conference on Public Communication* (pp. 131–150). <https://doi.org/10.2991/icpc-18.2019.12>
- Umasugi, F., & Djibat, B. (2020). Qualified school through total quality management implementation. In *Proceedings of the 1st Borobudur International*

Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019) (pp. 178–183). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.178>

Zainuri, A., Ibrahim, D., & Bafadlal, F. (2020). Management quality enhancement based on national accreditation standard of Islamic studies program. In *Proceedings of the 4th Asian Education Symposium (AES 2019)* (pp. 16–24). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200513.016>

Zhiyong, D. (2023). CIPP model applied research in online evaluation of online teaching of internet marketing. *Curriculum and Teaching Methodology*, 6(11), 115–124. <https://doi.org/10.23977/curtm.2023.061115>